

**TRANSFORMASI GAGASAN MASYARAKAT KEWARGAAN (*CIVIL SOCIETY*)
MELALUI REFORMASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA
(Studi Pengembangan Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Pada
Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Era Reformasi)**

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari
Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Pendidikan
Bidang Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Konsentrasi Pendidikan Kewarganegaraan



Promovendus:

SAMSURI
NIM. 0601498

**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BANDUNG
2010**

ABSTRAK

Samsuri. 2010. *Transformasi Gagasan Masyarakat Kewargaan (Civil Society) Melalui Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia (Studi Pengembangan Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Era Reformasi)*. Program Studi Pendidikan IPS. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Promotor: Prof. Dr. Idrus Affandi, S.H.; Ko-Promotor: Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A.; Anggota: Prof. Dr. Karim Suryadi, M.Si.

Gerakan reformasi politik nasional Indonesia pasca-1998 telah membuka peluang perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara di segala bidang. Di bidang pendidikan nasional, gagasan masyarakat kewargaan (*civil society*) memiliki arti penting dalam pembaharuan pendidikan kewarganegaraan yang sejalan dengan sistem politik demokratis. Penelitian ini dilakukan untuk menggali dan melacak seluruh proses dan produk pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan.

Tujuan penelitian ini ialah untuk menemukan upaya kebijakan pendidikan nasional di Indonesia mentransformasikan gagasan masyarakat kewargaan melalui kebijakan pengembangan pendidikan kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah era reformasi.

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumenter. Wawancara dilakukan terhadap sejumlah informan yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan, terutama pendidikan kewarganegaraan. Kajian dokumenter dilakukan terhadap sumber-sumber primer maupun sekunder.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) gerakan reformasi telah mempengaruhi gagasan konstruksi masyarakat kewargaan; (2) penyusunan karakter masyarakat kewargaan melalui reformasi pendidikan kewarganegaraan menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan sama sekali tidak bisa dipisahkan dari lingkungan politik yang melatarinya, sehingga kebijakan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia pun sangat kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai dari sistem politik yang tengah berlangsung; (3) transformasi gagasan masyarakat kewargaan demokratis yang dijabarkan dalam reformasi pendidikan kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menekankan kepada pembentukan kompetensi kewarganegaraan demokratis.

ABSTRACT

Samsuri. 2010. *The Transformation of Civil Society Ideas Through Civic Education Reform in Indonesia (Study on Developing the Civic Education Policy at the Elementary and Secondary Education Levels in Reform Era)*. Social Studies Education Program. School of Postgraduate Studies. Bandung: Indonesia University of Education. Promotor: Prof. Dr. Idrus Affandi, S.H.; Co-Promotor: Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A.; Member: Prof. Dr. Karim Suryadi, M.Si.

Post-1998 reform movement in Indonesian has brought some implications toward all living aspects of the country. One of those is education sector. Shaping civil society through civic education is one of education reform, even that effort should face some constraints, especially in constructing the policies, methodologies, and practices. Therefore, this research is conducted in order to explore and track the whole process and product of the civic education curriculum development.

The purpose of this research is find out the process and product of national education policies in the era of reformation to transform the idea of civil society through civic education reform for elementary and secondary education.

In finding the data, this research is applying interview technique to some important informants involving in the policies-making process and documentary exploration technique.

The findings of this research are as follows: (1) the idea of civil society construction has been influenced by the reformation movement; (2) in constructing the character of civil society has been influenced by political circumstances, and; (3) transformation of democratic civil society is manifested into civic education.

**TRANSFORMASI GAGASAN MASYARAKAT KEWARGAAN (*CIVIL SOCIETY*)
MELALUI REFORMASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA
(Studi Pengembangan Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Pada
Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah)**

RINGKASAN DISERTASI

I. Latar Belakang Masalah

Peran warga negara, baik secara individual maupun secara kelompok seperti di lembaga-lembaga kemasyarakatan, dalam perumusan dan pengambilan keputusan untuk kebijakan publik merupakan salah satu karakteristik dari sebuah negara demokrasi. Hal itu dapat dilakukan melalui partisipasi sukarela dengan membentuk asosiasi-asosiasi masyarakat kewargaan (beberapa menyebutnya sebagai organisasi non-pemerintah, *Non-Government Organization* (NGO)) secara bebas, di mana para warga negara dapat melakukan kebaikan bersama (*common good*) sebagai perwujudan partisipasi aktifnya dalam sebuah ruang publik. Melalui keterlibatan warga (*civic engagement*) tersebut, warga negara mengembangkan pengetahuan, kecakapan, kebajikan, dan kebiasaan (*habits*) yang membuat demokrasi dapat bekerja (Patrick 1999: 41). Pada taraf tertentu asosiasi-asosiasi masyarakat kewargaan (*civil society*) dapat menjadi kekuatan tandingan (*countervailing*) melawan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan (Patrick, 1999: 41).

Keberhasilan gerakan masyarakat kewargaan (*civil society*) menumbangkan rejim Komunis di belahan Eropa Timur dan Tengah pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, telah membuka cakrawala baru terhadap arti penting masyarakat kewargaan (*civil society*) untuk kehidupan politik demokratis. Masyarakat kewargaan dalam konteks Eropa Timur dan Tengah diposisikan secara dikotomis, dalam arti penghadapan masyarakat kewargaan melawan (versus) dominasi dan hegemoni negara atas diri mereka sendiri. Pada gilirannya, wacana masyarakat kewargaan dengan berbagai terminologi yang melingkupinya kembali menjadi agenda demokratisasi global.

Di sisi lain, runtuhnya imperium Uni Soviet yang merepresentasikan Blok Timur (Komunis) sebagai tanda akhir Perang Dingin, oleh sejumlah ilmuwan politik telah melahirkan sejumlah kekhawatiran sekaligus terhadap kemungkinan terjadinya bentuk perang baru. Francis Fukuyama (1989; 1992) menyebut akhir

Perang Dingin sebagai akhir sejarah (*The End of History*), di mana kapitalisme dan demokrasi liberal menjadi pemenang atas ideologi komunisme. Harapan terhadap masyarakat kewargaan untuk mewujudkan tatanan sistem politik demokratis pasca kejatuhan rejim Komunis di Eropa Timur dan Tengah, justru telah melahirkan bentuk-bentuk konflik dan peperangan baru berskala lokal ataupun regional. Masyarakat kewargaan yang tumbuh selama kekuasaan rejim Komunis mengalami kegagalan ketika dihadapkan kepada situasi baru perubahan tatanan politik nasional dan regional yang berdampak secara internasional. Lahirnya kesadaran etnik yang menjalar menjadi perang saudara (perang sipil, *civil war*) dari masyarakat di bekas-bekas negara bagian Uni Soviet, dan bekas Yugoslavia (Kolstø, 2008) adalah beberapa contoh lemahnya fondasi masyarakat kewargaan di bekas negara-negara yang lebih dari lima dekade di bawah kediktatoran rejim komunis. Kepercayaan (*trust*) dan jaringan ikatan sosial (*social network*) sebagai bentuk-bentuk modal sosial dari masyarakat kewargaan (Putnam, 1993) tampak belum sepenuhnya terbentuk, sehingga mudah mengalami konflik.

Pada skala global, kekhawatiran Samuel P. Huntington (1993; 1996) terhadap kemungkinan adanya perang baru bernama “perang antar peradaban” (*the clash of civilizations*) merupakan indikasi bahwa kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal atas runtuhnya rejim-rejim komunis, bukanlah kemenangan seluruhnya bagi masyarakat kewargaan (baik di tingkat nasional maupun global) itu sendiri. Amerika Serikat sebagai agen utama kapitalisme dan demokrasi liberal berusaha mempengaruhi masyarakat dunia dengan menjadikan dirinya sebagai model bagi negara-negara lain, khususnya di bekas negara-negara komunis dan negara dunia ketiga. Sebagai *super power* tunggal pada pasca Perang Dingin ini, Amerika Serikat mengalami sindrom “*benign hegemon*” (hegemoni lunak) dengan menyebarkan kepada dunia yaitu tiga kata majemuk khas, yaitu “*American uniqueness, American virtue, and American power*” (Huntington, 1999: 38).

Pada skala nasional Indonesia, pergumulan masyarakat kewargaan masih sedang mengkonsolidasikan kehidupannya, meskipun sebelumnya pernah memiliki berbagai ragam bentuk atribut demokrasi (era demokrasi liberal, demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila). Selain itu, Indonesia perlu membangun budaya politik kewargaan (*civic culture*) yang demokratis dengan makin terbukanya ruang publik, tempat masyarakat kewargaan memberdayakan dirinya di dalam sistem politiknya (negara). Hal itu semuanya adalah dalam rangka menjadikan Indonesia yang unik (*uniqueness*), bijak (*virtue*) dan kuat (*powerful*).

Persoalannya, di manakah masyarakat kewargaan dalam gerakan reformasi di Indonesia? Studi Mansour Fakih (1996) menunjukkan keberadaan masyarakat kewargaan dalam bentuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bekerja di tingkat arus bawah (*grass root*) dengan berbagai macam spesifikasi programnya. Pada bagian lain, organisasi-organisasi kemasyarakatan (ormas)

seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), adalah beberapa contoh organisasi masyarakat kewargaan yang keberadaannya tidak lebih sebagai kepanjangan tangan pemerintah Orde Baru ketika itu. Di bidang keagamaan Islam, ormas seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) yang berdiri jauh sebelum Republik Indonesia terbentuk, peranannya sebagai organisasi masyarakat kewargaan mengalami pasang surut sejalan dengan kepemimpinan dan kepentingan yang tumbuh dalam masing-masing lembaga tersebut. Partai politik seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) serta Golongan Karya (Golkar), sebagai kekuatan politik di tingkat infrastruktur sama-sama terhegemoni oleh kekuasaan rejim Orde Baru. Partai politik tidak dapat membangun kekuatan gerakan masyarakat kewargaan, karena mereka sendiri merupakan kekuatan politik yang terputus dengan basis konstituennya dengan kebijakan massa mengambang (*floating masses*).

Sebagaimana telah diketahui, bahwa paradigma pendidikan kewarganegaraan di Indonesia selama lebih 30 tahun pada era Orde Baru lebih banyak dititikberatkan kepada pembentukan karakter kepatuhan warga negara (siswa) terhadap tafsir resmi rejim politik. Kepatuhan warga negara terhadap tafsir rejim (pemerintah) dianggap sebagai kebajikan atau keutamaan warga negara (*civic virtues*) yang dilekatkan pada misi pendidikan kewarganegaraan ketika itu. Kepatuhan ini di satu sisi melahirkan hipokrisi (kemunafikan) antara wacana dengan tindakan kewargaan (*civic action*) yang diharapkan. Di sisi lain, ukuran keutamaan tindakan kewargaan sebagai akibat hipokrisi tadi ialah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan dan kepentingan politik serta ekonomi dalam jabatan publik, sehingga tindakan kewargaan yang diekspresikan seorang individu cenderung bersifat semu.

Penggambaran warga negara yang patuh, hegemoni tafsir dan wacana dari negara terhadap warga negara, serta minimnya peluang budaya kritis dalam hubungan masyarakat kewargaan (*civil society*) dengan masyarakat politik (negara) selama hampir 32 tahun di Indonesia, pada gilirannya telah membentuk budaya politik kewargaan yang tidak kondusif terhadap sistem politik demokrasi. Dalam lingkup pendidikan kewarganegaraan pada era Orde Baru, analisis Kalidjernih (2005) terhadap wacana kewarganegaraan dalam buku-buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) terbitan resmi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) menunjukkan bagaimana kuatnya kepentingan politik rejim mengkonstruksi warga negara sedemikian rupa selama Orde Baru. Buku-buku teks pendidikan kewarganegaraan tersebut sebagai buku wajib di sekolah menggambarkan kuatnya konsep ideologi negara, konstitusi nasional dan ide negara integralistik, sebagai

suatu prinsip panduan dalam narasi bangsa menurut tafsir rejim (Kalidjernih, 2005: 360).

Sebelum diperkenalkannya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam Pendidikan Moral Pancasila (PMP) ataupun Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) didominasi oleh materi nilai-nilai moral Pancasila (Langenberg, 1990:132). Orientasi kajian dan tujuan PMP maupun PPKn lebih mirip sebagai pendidikan budi pekerti daripada pendidikan kewarganegaraan yang sesungguhnya. Implikasinya, pendidikan kewarganegaraan sering diidentikan dengan pendidikan budi pekerti. Cakupan substansi kajian dan kompetensi kewarganegaraan yang diharapkan dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri yaitu upaya pembentukan warga negara yang baik (*good citizen*) sebagai warga negara demokratis yang bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sistem politik negaranya. Namun cakupan tersebut nampaknya direduksi hanya menjadi semata-mata menghapuskan nilai-nilai moral, bagaimana harus berbuat baik dan tidak berbuat buruk dalam arti afeksi-moral secara formal. Pendidikan kewarganegaraan berdasar KBK mulai tahun 2004 ternyata juga menuai kritikan. Oleh banyak kalangan Pendidikan Kewarganegaraan ini dinilai sangat kering dengan muatan nilai moral, khususnya nilai moral Pancasila, namun sarat dengan kajian konsep-konsep politik dan hukum.

Sementara itu, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di lembaga pendidikan formal (sekolah) cenderung tercerabut dari akar konteks kehidupan siswa sebagai warga negara. Pengkajian oleh para sarjana (Kalidjernih, 2005; Cholisin, 2004) terhadap fungsi pendidikan kewarganegaraan pada masa Orde Baru, semakin memperkuat alasan bahwa peran pendidikan kewarganegaraan semata sebagai alat transmisi kepentingan rejim, pengagungan harmoni (selaras, serasi dan seimbang) dengan menolak pengakuan terhadap perbedaan dan konflik. Ketika reformasi politik dan hukum nasional bergulir, paradigma pendidikan kewarganegaraan yang masih bercorak hegemonik cenderung menjadi tidak menarik dan termarginalkan.

Pembangunan budaya politik demokratis di Indonesia setelah 1998 dalam taraf kuantitas menunjukkan arah kemajuan. Hal ini ditandai dengan penyelenggaraan sistem pemilu legislatif dan eksekutif di tingkat nasional dan daerah secara masif dan rutin. Secara kualitatif, sistem nilai demokrasi yang menghargai perbedaan ragam pendapat, pandangan, dan kemajemukan, justru menghadapi masalah dalam pembangunan demokrasi tersebut. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan di tingkat persekolahan yang acapkali diterjemahkan sebagai bentuk pendidikan demokrasi memiliki peran penting untuk mentransformasikan idealitas masyarakat kewargaan yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi.

Pendidikan kewarganegaraan yang efektif telah dikembangkan dan terus dipraktikkan di sejumlah negara demokrasi maju dan negara-negara bekas komunis (Hamot, 2003; White, 2003). Kondisi tersebut juga menunjukkan bagaimana pembentukan karakter warga negara yang diharapkan untuk mendukung demokrasi konstitusional ditentukan pula oleh efektivitas pengembangan dan implementasi kebijakan pendidikan kewarganegaraan mulai dari level suprastruktur hingga infrastruktur.

Pertanyaannya ialah, apakah kebijakan pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk warga negara yang baik dapat bebas dari kepentingan politik yang sedang berlangsung? Dengan kata lain, bagaimana upaya yang harus dilakukan agar kebijakan pendidikan kewarganegaraan tidak tergantung kepada setiap perubahan politik rezim, tetapi mendasarkan diri kepada politik negara sebagaimana dimuat dalam konstitusi nasional. Dengan demikian, siapapun yang memerintah atau apapun program pemerintah, idealnya substansi kajian pendidikan kewarganegaraan tidak semata-mata mengikuti perubahan haluan politik yang ada, tetapi ditujukan untuk memperkuat basis nilai-nilai dalam sebuah sistem politik yang disepakati dalam konstitusi.

Di bagian lain, gagasan masyarakat kewargaan yang berkembang dan menjadi agenda reformasi nasional di Indonesia memberikan peluang besar bagi pendidikan kewarganegaraan untuk mentransformasikannya sebagai muara pencapaian kompetensi kewargaan di sekolah. Dalam tradisi politik di negara-negara Barat maupun di bekas pemerintahan otoriter di negara-negara bekas Komunis pasca-Perang Dingin, gagasan masyarakat kewargaan telah ditransformasikan melalui proses pendidikan kewarganegaraan. Pengalaman di negara lain tersebut dapat menjadi pelajaran untuk melihat bagaimana pengembang dan pembuat kebijakan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia mentransformasikan gagasan tersebut.

Dari paparan tersebut di atas dapat diperoleh penjelasan bahwa kebijakan politik berpotensi besar mempengaruhi arah pendidikan. Dengan demikian, pencapaian idealitas masyarakat kewargaan dalam tatanan demokrasi menjadi alasan penting bagi pembuatan kebijakan pendidikan untuk menyokong pendidikan kewarganegaraan demokratis. Oleh karena itu, penelitian ini menganggap penting untuk dilakukan sehingga diperoleh pemaknaan signifikansi arah kebijakan pendidikan nasional Indonesia untuk mentransformasikan gagasan masyarakat kewargaan melalui reformasi pendidikan kewarganegaraan pasca-1998.

B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang tersebut di atas, penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian kepada persoalan bagaimana kebijakan pendidikan nasional mentransformasikan gagasan masyarakat kewargaan (*civil society*) melalui

reformasi pendidikan kewarganegaraan yang diperlukan dalam sistem politik di Indonesia sekarang dan ke depan.

Untuk itu, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan: “Bagaimana kebijakan pendidikan nasional Indonesia pada era reformasi mentransformasikan gagasan masyarakat kewargaan melalui pembaharuan pendidikan kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok penelitian ini ialah menemukan alur proses dan hasil pengambilan kebijakan pendidikan nasional Indonesia di era reformasi dalam upaya mentransformasikan gagasan masyarakat kewargaan melalui pembaharuan pendidikan kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

D. Signifikansi dan Manfaat Penelitian

Arti penting pembentukan masyarakat kewargaan melalui pendidikan kewarganegaraan sejalan dengan tuntutan global. Pergeseran paradigmatik pendidikan kewarganegaraan antara lain dipengaruhi pula oleh globalisasi gerakan masyarakat kewargaan. Paradigma baru ini memfokuskan diri pada upaya membentuk peserta didik sebagai masyarakat kewargaan dengan memberdayakannya melalui proses pendidikan agar dapat berpartisipasi aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis.

Dari arti penting tersebut, maka penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis.

- a. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan gagasan masyarakat kewargaan sebagai substansi kajian kewarganegaraan.
- b. Penelitian ini memperkuat bagian kajian politik pendidikan dalam periode transisi politik di Indonesia terhadap upaya membangun warga negara demokratis melalui pendidikan kewarganegaraan di sekolah.
- c. Dari perspektif Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, penelitian ini memperkuat substansi kajian modal sosial (*social capital*) dalam masyarakat kewargaan.

2. Manfaat Praktis.

- a. Penelitian ini memberikan kerangka prosedur pengembangan idealitas masyarakat kewargaan dalam pendidikan kewarganegaraan di jenjang pendidikan formal.
- b. Penelitian ini memberikan pemahaman hermeneutis proses-proses dan produk kebijakan pendidikan (SI dan SKL) yang menjadi panduan bagi

pengembang kebijakan pendidikan kewarganegaraan pada tingkat *midle-structure* dan *infra-structure*.

E. Sistematika Disertasi

Kajian disertasi ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, memuat uraian-uraian tentang latar belakang yang mendorong penelitian, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan, signifikansi dan manfaat penelitian, klarifikasi konsep untuk mempertegas judul penelitian ini, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, memuat uraian studi kepustakaan untuk memperlihatkan konstruk teoritis reformasi pendidikan kewarganegaraan. Bab ini secara keseluruhan memaparkan aspek teoritis faktor-faktor "antecedent" yang melatari reformasi pendidikan kewarganegaraan sebagai medium transformasi gagasan masyarakat kewargaan.

Bab III Metode Penelitian, memuat uraian metode dan pendekatan, subjek penelitian, prosedur, teknik pemeriksaan keabsahan data, analisis dan penyajian data.

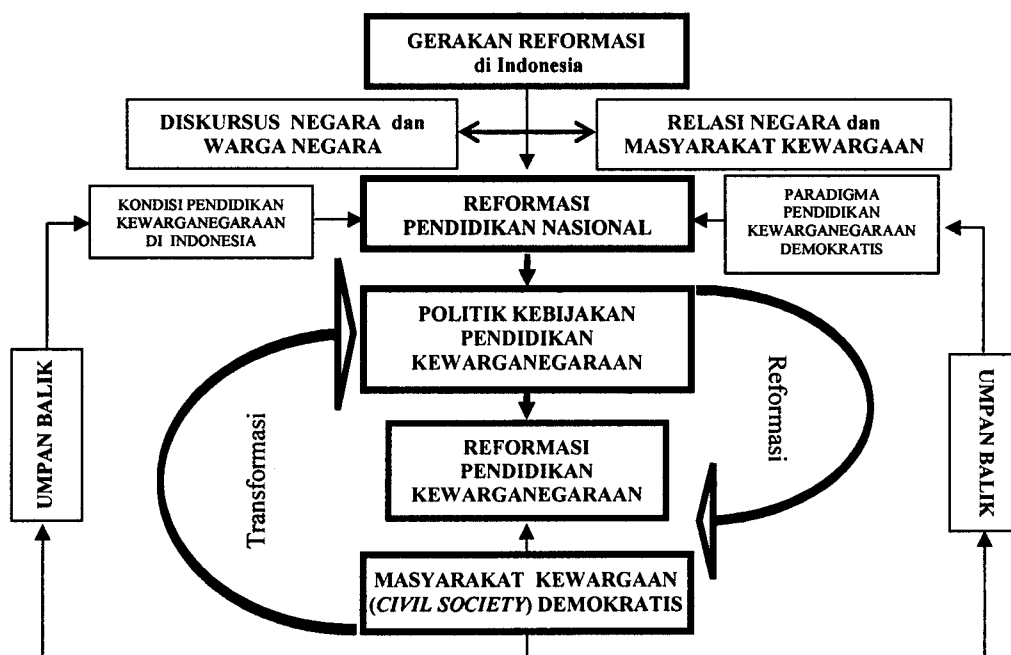
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, sebagaimana judul bab-nya, memuat temuan-temuan penelitian. Pembahasan terhadap temuan penelitian menyoroti aspek-aspek krusial dari transformasi gagasan masyarakat kewargaan dalam pengembangan kebijakan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia era reformasi.

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi, memuat empat kesimpulan dan tiga rekomendasi.

V. Konstruk Teoritis Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan

Reformasi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia tidak terlepas dari konteks politik kebijakan pendidikan nasional, yang dipengaruhi oleh diskursus hubungan antara negara dan masyarakat kewargaan/warga negara, serta kondisi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dengan paradigma pendidikan kewarganegaraan demokratis di dunia. Dengan demikian, kajian penelitian ini pada akhirnya bermuara kepada jawaban terhadap persoalan bagaimana kebijakan pendidikan nasional dilakukan untuk mentransformasikan gagasan masyarakat kewargaan melalui pembaharuan pendidikan kewarganegaraan pasca-Orde Baru.

Konstruksi teoritis reformasi pendidikan kewarganegaraan secara skematis disajikan dalam bagan berikut.



Bagan 1. Konstruk Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan

Asumsi dari Bagan 1 tersebut ialah bahwa: *pertama*, kajian pendidikan kewarganegaraan akan selalu mencerminkan nilai politik dalam sistem politik tertentu. Dalam prakteknya pendidikan kewarganegaraan berperan sebagai sarana sosialisasi nilai-nilai politik kepada warga negara muda (siswa). Dari sini akan tampak apakah pendidikan kewarganegaraan menjadi alat untuk memelihara kepentingan kekuasaan rejim dalam bentuk indoktrinasi serta pembentukan hegemoni ideologis (Cogan, 1998: 5). Ataupun sebaliknya, pendidikan kewarganegaraan menjadi sarana penting untuk memelihara dan mentransformasikan nilai-nilai politik dari suatu sistem politik melalui proses pendidikan di sekolah (Dawson, Prewitt, dan Dawson, 1977: 27). Dua pilihan ini akan memperlihatkan bagaimana sebenarnya pendidikan kewarganegaraan diposisikan dalam aras kebijakan pendidikan nasional di Indonesia selama ini.

Kedua, reformasi pendidikan dipengaruhi oleh tatanan nilai yang berkembang dominan dan dianut oleh sistem politik yang ada. Dengan demikian keberhasilan reformasi pendidikan akan dipengaruhi oleh kemauan politik untuk memperjuangkan dan mewujudkan nilai-nilai tersebut.

Ketiga, sebagaimana konsep hak asasi manusia dan demokrasi, konsep *civil society* secara universal dapat diterima sebagai satu bentuk entitas di luar negara dan pasar untuk menjaga sehat dan berjalannya sistem demokrasi. Namun, implementasi gagasan *civil society* di masing-masing negara akan dipengaruhi oleh sistem nilai dan kepentingan yang dianut oleh masyarakat di mana hubungan warga negara dan negara itu dibangun. Dengan demikian akan terdapat perbedaan

praksis *civil society* antara satu masyarakat suatu negara dengan masyarakat lain di negara yang berbeda.

Penjelasan terhadap konstruk teoretis tersebut memperlihatkan bahwa reformasi pendidikan kewarganegaraan sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor “antecedent” pendukung. Faktor-faktor tersebut meliputi gerakan reformasi nasional Indonesia, diskursus negara dan warga negara, relasi negara dan masyarakat kewargaan, dinamika kebijakan pendidikan nasional, paradigma pengembangan pendidikan kewarganegaraan berbasis kompetensi, transformasi gagasan masyarakat kewargaan melalui pendidikan kewarganegaraan, politik pendidikan dalam pembentukan masyarakat kewargaan demokratis, dan posisi misi kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial untuk membangun warga negara yang baik.

VI. Metode Penelitian

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumenter. Wawancara dilakukan terhadap sejumlah informan yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan, terutama pendidikan kewarganegaraan. Kajian dokumenter dilakukan terhadap sumber-sumber primer maupun sekunder.

VII. Temuan Penelitian

1. Gagasan Masyarakat Kewargaan dalam Derap Gerakan Reformasi

Arah reformasi pendidikan nasional di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari gerakan reformasi secara nasional semenjak bergulir pada awal 1998. Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, momentum untuk melakukan reformasi total menjadi semangat besar bagi sebagian besar rakyat dan elit nasional Indonesia. Dalam ranah pendidikan, semangat mereformasi bidang ini mengemuka baik dalam tataran wacana maupun praksis tentang perlunya demokratisasi, desentralisasi dan pengembangan keilmuan yang tanggap terhadap persoalan kemasyarakatan dan kemanusiaan.

Pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, di luar persoalan kontroversi pengangkatannya sebagai presiden untuk menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri sebagai presiden, telah menunjukkan tekad yang kuat untuk melakukan reformasi nasional di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk tujuan tersebut, pada 7 Desember 1998 Presiden Habibie membentuk sebuah Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani (selanjutnya disebut Tim Nasional Reformasi) melalui Keputusan Presiden RI No. 198 Tahun 1998. Tim ini dipimpin oleh Adi Sasono sebagai Ketua Dewan Penasehat dan Sofian Effendi sebagai Ketua Tim Pelaksana. Tim reformasi meliputi tujuh kelompok bidang yaitu: Kelompok Reformasi Ekonomi (Koordinator M. Dawam Rahardjo), Kelompok Reformasi Tekno-Industri (Koordinator Laode M. Kamaluddin),